

DISERTASI

**PENINJAUAN KEMBALI (REQUEST CIVIL)
DALAM PERKARA PERCERAIAN PERSPEKTIF MASHLAHAT
(ANALISIS TERHADAP PUTUSAN-PUTUSAN PENINJAUAN
KEMBALI DI INDONESIA)**

**OLEH:
MISRAN
NIM 4001173049**

**PROGRAM STUDI
S-3 HUKUM ISLAM**



**PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
SUMATERA UTARA - MEDAN
2023 M**



**KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN
NOMOR 441 TAHUN 2022
TENTANG
PELAKSANAAN SEMINAR HASIL DISERTASI**

**DIREKTUR PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN**

- Menimbang : a. bahwa untuk penyelesaian pendidikan program Doktor pada Program Studi **Hukum Islam** mahasiswa atas nama **Misran**, NIM **4001173049**, Judul Disertasi "**Peninjauan Kembali (Request Civil) dalam Perkara Perkawinan Perspektif Hukum Islam (Analisis terhadap Putusan-Putusan Peninjauan Kembali di Indonesia)**", perlu diatur ketentuan tentang pelaksanaan Seminar Hasil Disertasi dalam bentuk Keputusan Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan;
- b. bahwa mereka yang namanya tersebut dalam keputusan ini dipandang mampu dan cakap untuk melaksanakan tugas sebagai panitia pelaksana Seminar Hasil Disertasi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Presiden RI Nomor 131 Tahun 2014 tentang Perubahan Institusi Agama Islam Negeri Sumatera Utara Medan menjadi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 14 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan;
7. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan;
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 232/U/2000 Tahun 2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi Dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa;
9. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 032401 dan 032402/B.II/3/2020, tanggal 2 November 2020 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan masa jabatan tahun 2020-2024;

10. Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan Nomor 503 Tahun 2020 tentang Pengangkatan Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan masa jabatan 2020-2024.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN TENTANG PELAKSANAAN SEMINAR HASIL DISERTASI**
- Kesatu : Menetapkan Pelaksana Seminar Hasil Disertasi Mahasiswa atas nama **Misran, NIM. 4001173049**, dengan susunan sebagai berikut:
Ketua Seminar : Dr. Dhiauddin Tanjung, M.A.
Sekretaris Seminar : Dr. Budi Sastra Panjaitan, M.Hum.
Penguji I : Prof. Dr. Pagar, M.Ag.
Penguji II : Dr. Dhiauddin Tanjung, M.A.
Penguji III : Prof. Dr. Asmuni, M.Ag.
Penguji IV : Dr. Fauziah Lubis, M.Hum.
Panitia : Muhammad Habib, M.Hi.
Gatot Teguh Arifyanto, M.H.
- Kedua : Tugas Panitia adalah:
a. Mempersiapkan administrasi Seminar Hasil Disertasi;
b. Melaksanakan Seminar Hasil Disertasi;
c. Mengumumkan hasil Seminar Hasil Disertasi;
- Ketiga : Pelaksanaan Seminar Hasil Disertasi ini akan dilaksanakan pada hari Jum'at, 23 September 2022.
- Keempat : Pembiayaan yang timbul akibat Keputusan ini dibebankan pada DIPA BLU UIN Sumatera Utara Medan Tahun 2022.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan dibetulkan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di Medan
Tanggal 9 September 2022



Direktur,

Hasan Bakti Nasution

Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Rektor UIN Sumatera Utara Medan
2. Yang bersangkutan.



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA
PASCASARJANA**

Jl. IAIN No. 1/ Sutomo Ujung Telp. & Fax. 061- 4560271 Medan 20253
Website: pascasarjana.uinsu.ac.id, E-mail: pascasarjana@uinsu.ac.id

Nomor : B.1581/PS.WD/PS.III/PP.00.9/09/2022
Sifat : Biasa
Lamp. : -
Hal : **Seminar Hasil Disertasi
An. Misran, NIM. 4001173049**

9 September 2022

Kepada
Yth.

1. Dr. Dhiauddin Tanjung, M.A. (Ketua Seminar)
2. Dr. Budi Sastra Panjaitan, M.Hum. (Sekretaris Seminar)
3. Prof. Dr. Pagar, M.Ag. (Penguji I)
4. Dr. Dhiauddin Tanjung, M.A. (Penguji II)
5. Prof. Dr. Asmuni, M.Ag. (Penguji III)
6. Dr. Fauziah Lubis, M.Hum. (Penguji IV)

di-

Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, kami mohon kesediaan Bapak/Ibu untuk dapat memimpin dan menguji Seminar Hasil Disertasi mahasiswa atas nama **Misran, NIM. 4001173049**, Program Studi **Hukum Islam**, dengan Disertasi judul "**Peninjauan Kembali (Request Civil) dalam Perkara Perkawinan Perspektif Hukum Islam (Analisis terhadap Putusan-Putusan Peninjauan Kembali di Indonesia)**", yang akan dilaksanakan pada:

Hari/Tanggal : Jum'at, 23 September 2022
Pukul : 14.00 WIB s/d Selesai
Tempat : Ruang Sidang Gedung Pascasarjana UIN Sumatera Utara Medan

Demikian kami sampaikan, atas perkenan dan kerjasama Bapak/Ibu kami ucapkan terima kasih.



Wassalam,
an. Direktur,
Wakil Direktur,

Dr. Phil. Zainul Fuad, M.A.
NIP. 19670423 199403 1 004

Tembusan:
Direktur Pascasarjana UIN Sumatera Utara Medan

LEMBAR PERSETUJUAN

Disertasi Berjudul:

**PENINJAUAN KEMBALI (*REQUEST CIVIL*)
DALAM PERKARA PERKAWINAN PERSPEKTIF *MASHLAHAT*
(ANALISIS TERHADAP PUTUSAN-PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
DI INDONESIA)**

**OLEH:
MISRAN
NIM 4001173049**

Setelah Dilakukan Bimbingan Dapat Disetujui Untuk Diajukan
Untuk Mengikuti Sidang Terbuka (Promosi)

PEMBIMBING I



**Prof. Dr. Pagar, M.A.
NIP. 1958231 199803 1 016**

PEMBIMBING II



**Dr. Dhiauddin Tanjung, S.H.I., M.A.
NIP. 197910202 200901 1 010**

ABSTRAK



PENINJAUAN KEMBALI (*REQUEST CIVIL*) DALAM PERKARA PERKAWINAN PERSPEKTIF MASYARAKAT (ANALISIS TERHADAP PUTUSAN PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI DI INDONESIA)

Misran

NIM : 4001173049
Prodi : Hukum Islam
Tempat/Tgl. Lahir : Pelawi, 14 Juli 1963
Nama Orang Tua (Ayah) : Ruslan
Pembimbing : 1. Prof. Dr. Pagar, M.A.
2. Dr. Dhiauddin Tanjung, M.A.

Peninjauan Kembali (*request civil*) merupakan upaya hukum luar biasa yang bertujuan memeriksa kembali putusan perdata yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), dimana hanya dapat diajukan berdasarkan pada alasan-alasan hukum yang termuat pada Pasal 67 Undang-undang Mahkamah Agung. Namun dalam penerapannya, upaya Peninjauan Kembali terhadap perkara perceraian memunculkan permasalahan ketidakpastian hukum atas perkawinan baru salah satu pihak, jika putusan Peninjauan Kembali secara nyata telah membatalkan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap pada tingkatan sebelumnya. Kondisi tersebut menjadi kontradiktif terhadap tujuan dan fungsi dari upaya hukum luar biasa Peninjauan Kembali secara teoritis. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab rumusan masalah terkait kedudukan perceraian dalam sistem hukum di Indonesia, dampak dan akibat hukum Peninjauan Kembali terhadap perkara perceraian perspektif hukum Islam, serta mengkonstruksikan putusan hakim tingkat Kasasi dalam putusan Peninjauan Kembali dalam perkara perceraian. Metode yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case Approach*) dan pendekatan komparatif (*comparative*) dan teknik analisis data menggunakan metode deskriptif analisis. Adapun kesimpulan dari penelitian ini terlihat bahwa konstruksi putusan hakim tingkat kasasi dalam putusan Peninjauan Kembali terhadap perkara perceraian terlihat lebih mengutamakan keadilan prosedural (*procedural justice*) daripada keadilan substantif (*substantive justice*). Dimana seharusnya keadilan substantif yang bersumber dari nilai-nilai yang lahir dari hukum yang responsif harus jadi prioritas utama ketimbang keadilan prosedural yang hanya memuat ketentuan-ketentuan hukum formal.

Kata Kunci: Upaya Hukum, Peninjauan Kembali, Perkara Perceraian

ABSTRACT



REVIEW (*CIVIL REQUEST*) IN MARRIAGE CASE OF *MASHLAAH* PERSPECTIVE (ANALYSIS OF REVIEW DECISIONS IN INDONESIA)

Misran

ID : 4001173049
Study Program : Islamic Law
Place/Date. Born : Pelawi, July 14, 1963
Name of Parents (Father) : Ruslan
Supervisor : 1. Prof. Dr. Pagar, M.A.
2. Dr. Dhiiauddin Tanjung, M.A.

Reconsideration (*request civil*) is an extraordinary legal effort aimed at re-examining civil decisions that have permanent legal force (*inkracht van gewijsde*), only based on legal reasons contained in Article 67 of the Law on the Supreme Court. However, in its application, the judicial review of divorce cases raises the issue of legal uncertainty over the new marriage of one of the parties, if the judicial review decision has clearly invalidated the decision that has permanent legal force at the previous level. This condition is contradictory to the objective and function of the theoretical judicial review. This study aims to answer the formulation of problems related to the position of divorce in the legal system in Indonesia, the impact and consequences of the judicial review of divorce cases from the perspective of Islamic law, as well as constructing the judge's decision at the Cassation level in the judicial review decision in divorce cases. The method used by the author in this study is a normative legal research using a statute approach, a case approach and a comparative approach and data analysis techniques using descriptive analysis methods. The conclusion of this study shows that the construction of the judge's decision at the cassation level in the judicial review decision on divorce cases seems to prioritize procedural justice rather than substantive justice. Where should substantive justice that comes from values born of responsive law should be a top priority than procedural justice which only contains provisions of formal law.

Keywords: Legal Efforts, Judicial Review, Divorce Cases

المخلص



مراجعة قضائية
في حالة الزواج من منظور القانون الإسلامي
(تحليل قرارات المراجعة في إندونيسيا)

مصران

4001173049

الشريعة الإسلامية

بيلوي 14 يوليو 1963

رسلان

Prof. Dr. Pagar, M.A.

Dr. Dhiauddin Tanjung, M.A.

رقم تعريف الطالب

برنامج الدراسة

مكان وتاريخ الولادة

اسم الأب

مشرف أطروحة

الطلب المدني هو جهد قانوني استثنائي يهدف إلى إعادة النظر في القرارات المدنية التي لها قوة قانونية دائمة ، والتي لا يمكن تقديمها إلا بناءً على الأسباب القانونية الواردة في المادة السابعة والستين من قانون المحكمة العليا. ومع ذلك ، فإن المراجعة القضائية لقضايا الطلاق في تطبيقها تثير مسألة عدم اليقين القانوني بشأن الزواج الجديد لأحد الطرفين ، إذا كان قرار المراجعة القضائية قد أبطل بوضوح القرار الذي كان له قوة قانونية دائمة على المستوى السابق. يتعارض هذا الشرط مع غرض ووظيفة المراجعة القضائية النظرية. تهدف هذه الدراسة إلى الإجابة على صياغة المشكلات المتعلقة بمكانة الطلاق في النظام القانوني في إندونيسيا ، وأثر ونتائج المراجعة القضائية لقضايا الطلاق من منظور الشريعة الإسلامية ، وكذلك بناء قرار القاضي في النقض. المستوى في قرار المراجعة القضائية في قضايا الطلاق. الطريقة التي استخدمها المؤلف في هذه الدراسة هي بحث قانوني معياري باستخدام نهج النظام الأساسي ، ومنهج الحالة والنهج المقارن وتنتج تحليل البيانات باستخدام طرق التحليل الوصفي. تظهر خاتمة هذه الدراسة أن ، بناء قرار القاضي على مستوى النقض في قرار المراجعة القضائية في قضايا الطلاق يبدو أنه يعطي الأولوية للعدالة الإجرائية بدلاً من العدالة الموضوعية. حيث يجب أن تكون العدالة الموضوعية التي تأتي من التقييم الناشئة عن القانون المستجيب أولوية قصوى من العدالة الإجرائية التي تحتوي فقط على أحكام القانون الرسمي.

الكلمات المفتاحية: المجهودات القانونية ، المراجعة القضائية ، قضايا الطلاق

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN	i
SURAT PERNYATAAN	ii
PEDOMAN TRANSLITERASI	iii
KATA PENGANTAR	iv
ABSTRAK	xii
DAFTAR ISI	xv
BAB I: PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	13
C. Batasan Masalah	14
D. Batasan Istilah	15
E. Tujuan dan Signifikansi Penelitian	19
F. Landasan Teori	20
G. Kajian Pustaka	27
H. Metode Penelitian	30
I. Sistematika Pembahasan	34
BAB II: TINJAUAN UMUM PERCERAIAN DARI BERBAGAI PERSPEKTIF HUKUM.....	36
A. Perceraian dalam Perspektif Hukum Islam	36
B. Kedudukan Perceraian Perspektif Hukum Islam	40
C. Klasifikasi Perceraian Perspektif Hukum Islam	46
D. Perceraian dalam Perspektif Hukum Nasional dan KHI	57
E. Kedudukan Perceraian dalam Hukum Positif	69
BAB III: KETENTUAN HUKUM ACARA DI PERADILAN AGAMA .	72
A. Ruang Lingkup Tugas dan Fungsi Mahkamah Agung	72
B. Kewenangan Mahkamah Agung	75
C. Hukum Acara di Peradilan Agama	77
D. Sumber Hukum Acara Peradilan Agama	84

E. Ruang Lingkup Upaya Hukum Peninjauan Kembali	84
F. Peninjauan Kembali dalam Hukum Islam	109
BAB IV: YURISPRUDENSI PENINJAUAN KEMBALI DALAM PENYELESAIAN PERKARA PERCERAIAN	114
A. Putusan Peninjauan Kembali Nomor 54/PK/AG/2008	114
B. Yurisprudensi Nomor 18/PK/AG/2009	117
C. Yurisprudensi Nomor 55/PK/AG/2017	123
D. Analisis Pertimbangan dan Putusan Hakim Perspektif Hukum Positif	132
E. Analisis Pertimbangan dan Putusan Hakim Perspektif Hukum Islam	141
BAB V: PENUTUP	155
A. Kesimpulan	155
B. Saran-saran	156
DAFTAR PUSTAKA	157
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	170
LAMPIRAN	173